

KAJIAN SOSIAL-BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Alfan Miko dan Elfitra

Abstract

It should be in the planning and management of forests and watersheds, not only based on physical conditions but also based on information about the socio-cultural conditions of local communities. It aims to make the management of forests and watersheds forward in accordance with the conditions and needs of local communities. Neglected socio-cultural aspects in forest and watershed development will have an impact on the low or minimum community participation in forest management, the increasing damage of physical infrastructure and environmental development facilities, and the increasing extent of forest destruction due to the urgent need of the people living around the forest. This paper explores the importance of socio-cultural aspects as a paradigm of sustainable forest development, important elements in the scope of socio-cultural studies and the relevance of this study to the concept of local wisdom. To enrich the case examples as comparators related to the socio-cultural aspects and local wisdom, a literature review of relevant research findings was conducted, as well as an analysis of the different cases from different parts of Indonesia.

Keywords: *socio-cultural study, local wisdom, social capital, forest management.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki hutan tropis yang terluas di dunia, termasuk kekayaan sumberdaya hutan, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa. Selama ini kekayaan dan keanekaragaman hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, masyarakat, dan negara Indonesia. Namun sayangnya pemanfaatan sumberdaya hutan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Banyak pemanfaatan hutan dalam praktiknya melanggar aturan-aturan yang ada, apalagi mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pemanfaatan hutan secara berlebihan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar telah berdampak terhadap meningkatnya deforestasi. Berdasarkan laporan FWI (2014) pada periode 2009-2015, laju deforestasi rata-rata adalah 1,13 juta ha per tahun.

Majalah Tempo (1/7/2014), melansir Indonesia mengalahkan Brasil sebagai juara bertahan dalam deforestasi atau penebangan hutan tertinggi di dunia. Menurut penelitian yang dimuat dalam jurnal *Nature Climate Change*, penebangan hutan di Tanah Air kini telah mengancam keanekaragaman hayati dan spesies langka di sana serta pemanasan global. Padahal, Indonesia disebut sebagai *megadiverse country* karena memiliki hutan terluas dengan keanekaragaman hayatinya terkaya di dunia.

Menurut keterangan Deputi FAO Representative bidang program di Indonesia, Ageng Herianto, berdasarkan data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia, total luas hutan yang dimiliki saat ini mencapai 124 juta hektar. Namun sejak 2010 sampai 2015, Indonesia kehilangan luas hutannya yang mencapai 684.000 ha tiap tahunnya (<http://www.kompas.com>).



FWI (2014) mencatat sekitar 73 juta ha luas tutupan hutan alam di Indonesia terancam oleh kerusakan yang lebih besar pada masa yang akan datang, baik yang disebabkan aktivitas penebangan dan konversi lahan yang terencana, akses terbuka (*open access*) terhadap lahan, serta ketidakhadiran pengelola di tingkat tapak. Berdasarkan analisis FWI kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta ha dan laju kehilangan hutan alam Indonesia adalah sekitar 1,13 juta ha per tahun. Kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) terbesar selama periode 2009-2013 berdasarkan urutan provinsi: Provinsi Riau 690 ribu ha, Kalimantan Tengah 619 ribu ha, Papua 490 ribu ha, Kalimantan Timur 448 ribu ha, dan Kalimantan Barat 426 ribu ha.

Selanjutnya tentang kondisi hutan alam Indonesia berdasarkan area pulau dapat dilihat pada tabel berikut.

Kondisi Tutupan Hutan Alam Indonesia Tahun 2009 dan 2013 (ribu ha)

| Pulau | Luas Daratan | Tutupan Hutan Alam 2009 | Tutupan Hutan Alam 2013 |
|--------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Sumatera | 46.616 | 12.610 | 11.344 |
| Jawa | 12.743 | 1.002 | 675 |
| Bali Nusa Tenggara | 7.137 | 1.350 | 1.188 |
| Kalimantan | 53.099 | 28.146 | 26.604 |
| Sulawesi | 18.297 | 9.119 | 8.928 |
| Maluku | 7.652 | 4.577 | 4.335 |
| Papua | 34.632 | 30.006 | 29.413 |
| Total | 180.177 | 87.074 | 82.487 |

Sumber : Purba, 2014)

Deforestasi yang terjadi di Pulau Sumatera sepanjang periode 2009-2013 mencapai 1.530.156 ha dan Pulau Kalimantan mencapai 1.541.693 hektar. Sementara Pulau Jawa meskipun angka deforestasinya hanya 326.953 hektar, namun dari segi persentase deforestasi terhadap luas tutupan hutan adalah yang tertinggi, yakni hampir mencapai 33%. Selanjutnya gambaran tentang deforestasi di masing-masing kawasan pulau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Deforestasi di Indonesia Periode 2009-2013.

| Pulau | Deforestasi 2009-2013 (Ha) | Persentase Deforestasi Terhadap Luas Tutupan Hutan Alam 2013 (%) |
|--------------------|----------------------------|--|
| Sumatera | 1.530.156,03 | 12,12 |
| Jawa | 326.953,09 | 32,64 |
| Bali Nusa Tenggara | 161.875,07 | 11,99 |
| Kalimantan | 1.541.693,36 | 5,48 |
| Sulawesi | 191.087,23 | 2,10 |
| Maluku | 242.567,90 | 5,30 |
| Papua | 592.976,57 | 1,98 |

Sumber: Forest Watch Indonesia 2014

Empat penyebab tidak langsung dari deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia adalah: (a) perencanaan tata ruang yang tidak efektif, (b) masalah-masalah terkait dengan tenurial, (c) pengelolaan hutan yang tidak efisien dan efektif, dan (d) penegakan hukum yang lemah serta maraknya korupsi di sektor kehutanan dan lahan (UNDP, 2013).

Gejala deforestasi yang berlangsung secara parah dari tahun ke tahun tentu saja membawa dampak buruk terhadap lingkungan, pembangunan dan tentunya juga terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Akhir-akhir ini kita sering mendengar dan menyaksikan sendiri dampak bencana alam yang timbul seperti terjadinya, banjir, tanah longsor, kekeringan, peningkatan emisi gas rumah kaca, perubahan iklim yang tak menentu, hilangnya satwa liar, dan munculnya berbagai konflik baru antar kepentingan seputar agraria, hutan dan sumber daya alam.

Kerusakan hutan juga bisa membawa dampak terhadap terancamnya pembangunan dan terganggunya fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan penting masyarakat secara umum. Sejumlah PLTA sebagai pembangkit energi di Indonesia mengalami gangguan akibat gundulnya hutan sebagai sumber air. Sebagai contoh keberadaan PLTA Koto Panjang yang berfungsi sebagai penghasil energi dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari Sungai Kampar Kanan dan Batang Mahat. PLTA Koto Panjang selama ini mampu menghasilkan daya 114 MW dari 3 turbin

yang beroperasi dan menjadi pemasok kebutuhan listrik dalam interkoneksi Sumatera. Namun, waduk PLTA Koto Panjang menghadapi permasalahan yang serius sejak beberapa tahun terakhir. Kontinuitas air yang tidak stabil, kekeruhan pada saat musim kemarau dan banjir pada musim hujan telah menyebabkan pembangkit listrik tersebut tidak berfungsi secara optimal. Kondisi ini berdampak terhadap menurunnya produksi listrik yang dihasilkan, bahkan mengalami kegagalan beroperasi seperti yang terjadi pada tahun 2015.

Adanya gejala deforestasi dan kerusakan lingkungan yang terus bertambah parah terjadi beserta segala dampak yang ditimbulkannya tentunya berhubungan dengan konsep dan praktik pembangunan kehutanan di Indonesia yang berjalan selama ini. Cara pandang yang mengedepankan aspek ekonomi dalam tata kelola hutan sangat mendominasi, sehingga sumber daya tersebut dimanfaatkan secara keliru. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan lebih berorientasi pada kayu semata (*timber attraction*) tidak memandang hutan sebagai sumber daya yang multi produk. Tata kelola demikian menguntungkan hanya sebagian pihak saja sementara kerugian ditanggung oleh semua pihak (masyarakat). Sehingga tidak

perlu diperhatikan para pemangku kepentingan dalam mengabaikan investasi untuk pemeliharaan hutan. Tiga dasawarsa pengelolaan hutan merupakan potret buram pembangunan kehutanan di Indonesia. Pengelolaan tersebut dicerminkan oleh maraknya berbagai persoalan yang saat ini dihadapi sebagai sebuah krisis (Osujaer, 2007:35). Konflik lahan antar pemangku kepentingan di kawasan hutan, bencana kebakaran hutan, deforestasi yang berdampak pada erosi dan sedimentasi,

perambahan dan pencurian kayu (*illegal logging*), dan tersingkirnya penduduk lokal, merupakan beberapa persoalan kritis yang sampai hari ini belum terselesaikan. Kelestarian hutan dan kelangsungan hidup masyarakatnya saat ini menjadi suatu wacana yang sangat langka bahkan cenderung hilang bersama perubahan ekologi hutan dan sosial budaya masyarakat.

Berangkat dari praktik pembangunan kehutanan tersebut, tulisan ini menggarisbawahi pentingnya kajian sosial budaya dengan memperhatikan kearifan masyarakat lokal dalam tata kelola hutan dan kawasan daerah aliran sungai. Dalam tulisan ini dibahas tentang urgensi kajian sosial budaya dalam perencanaan dan pengelolaan, memahami konsep kearifan lokal, praktik dan cara kerjanya dalam tata kelola hutan dan DAS serta wacana dan praktik pembangunan hutan yang berbasis masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun berdasarkan kajian literatur terhadap sejumlah penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari berbagai tempat yang berbeda. Sumber utama referensi berupa buku-buku teoritis yang terkait dengan konsep kajian sosial-budaya ditambahkan dengan hasil kajian lapangan dan pengalaman yang dipraktikkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih bervariasi sesuai dengan tempat dan konteks sosial budaya yang beragam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Kajian Sosial Budaya

Kajian terhadap manusia dan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan dan daerah aliran sungai sangat penting. Hal ini sejalan dengan Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan



Lingkungan Hidup, (UU No 4 tahun 1982) yang menyebutkan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangugan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Disini manusia menjadi kunci perubahan dalam lingkungannya karena manusia dan ingkai lakunya mampu mempengaruhi kelangugan hidup seluruh makhluk secara umum. Dengan adanya hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan, diharapkan manusia dapat bersikap dan berperilaku arif terhadap lingkungannya.

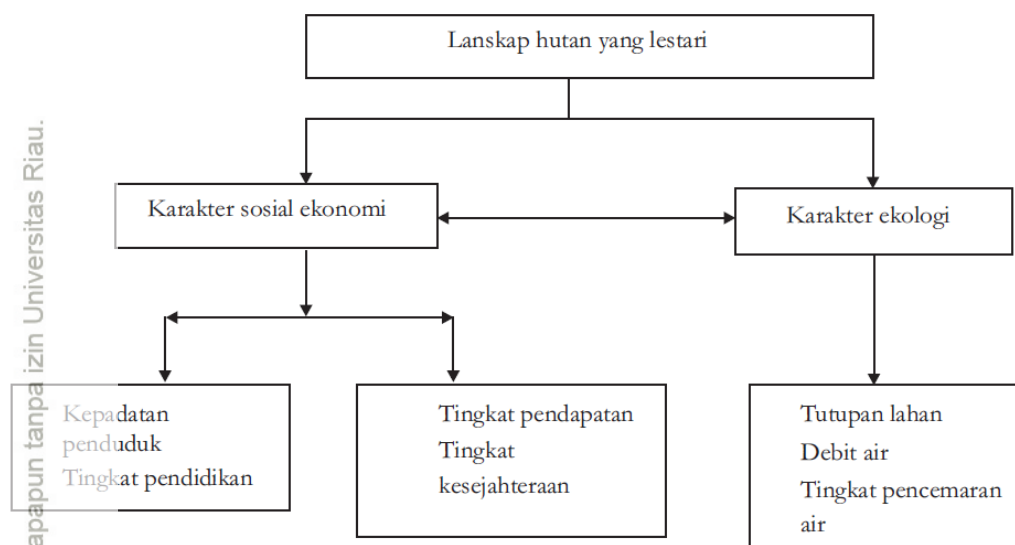
Wagner (2005) menyatakan bahwa untuk menyusun perencanaan pengelolaan DAS yang efektif, tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik DAS tersebut, tetapi juga harus berdasarkan informasi kondisi sosial masyarakat. Hal ini ditujukan agar sistem pengelolaan DAS tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal. Disisi lain pemahaman yang baik tentang perilaku dan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar hutan merupakan informasi yang sangat penting dan bermanfaat bagi pihak pengambil kebijakan untuk menyusun strategi pengelolaan dan upaya kelestarian.

Sebagai contoh studi Nugroho et.al (2008: 228-229) tentang kawasan hutan Kecamatan Pongkor, Kecamatan Pancasari terletak di Kabupaten Tabanan, Bali, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sumberdaya hayati dalam kawasan hutan oleh masyarakat sekitar hutan dan mengetahui karakteristik sosial ekonomi penduduk. Studi ini menemukan bahwa analisis frekuensi usia terhadap responden yang memanfaatkan sumberdaya hayati hutan paling besar berada pada kisaran usia 20-27 tahun dan 28-35 tahun yang mencapai 24%, sedangkan rentang usia 68-75 hanya sebesar 2%. Hal ini dapat

disebabkan, dalam pengambilan sumberdaya hayati hutan masyarakat perlu berjalan jauh dan beban yang harus dibawa cukup berat. Kondisi ini memerlukan kondisi tubuh yang relatif baik.

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan jumlah terbesar responden yang mengambil sumberdaya hayati hutan adalah berpendidikan SD (32%). Hasil analisis memperlihatkan pada tingkat pendidikan yang rendah (tidak tamat SD dan tamat SD) sebanyak 78% memanfaatkan sumberdaya hayati hutan. Rendahnya tingkat pendidikan ikut menyebabkan rendahnya keterampilan masyarakat. Dengan sebagian besar berada pada kisaran umur produktif, kegiatan pengambilan sumberdaya hutan juga dijadikan sebagai mata pencaharian. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan mereka yang berada pada golongan usia produktif tidak dapat diserap dalam lapangan pekerjaan formal.

Studi yang dilakukan Salminah et.al. (2008) menemukan bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk suatu wilayah, menyebabkan kebutuhan lahan untuk pemukiman juga semakin tinggi. Tingginya kebutuhan lahan untuk pemukiman, pertanian dan sektor lainnya menyebabkan keberadaan hutan sangat rentan terhadap konversi. Analisis GIS mengindikasikan bahwa desa dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi memiliki areal pemukiman yang tinggi pula. Adapun desa dengan kepadatan penduduk yang rendah umumnya memiliki luasan hutan, perkebunan dan pertanian yang cukup luas. Dengan mempelajari kerangka penelitian ini, kita terbantu untuk memahami karakteristik sosial ekonomi yang menentukan kelestarian lanskap hutan pada daerah aliran sungai. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



Gbr. 1. Kerangka Analisis Penelitian DAS Baturusa dan DAS Cidana
(Sumber : Salminah, Mimi, et.al.,2014)

- Pentingnya analisis sosial budaya ditunjukkan oleh hasil pengalaman SCDev-Unand dalam pendampingan sosial program kehutanan sosial (*agroforestry*) di Nagari Mahat, Kabupaten Lima Puluh Kota. Faktor sosial yang menghambat keberlanjutan tersebut adalah karakteristik sosial-ekonomi penduduk dengan mata pencaharian dari usaha tanaman gambir yang dikenal “lapar panen”. Untuk pengolahan gambir setelah panen, penduduk membutuhkan kayu-kayu bakar yang banyak, sehingga hal ini ikut berpengaruh terhadap praktik pengendalian hutan di kawasan perbukitan. Disamping itu, “kegagalan” program ini disebabkan oleh fakta seringkali daerah ini menerima proyek-proyek pembangunan di masa-masa lampau. Sehingga terbentuk stereotipe atau image yang baik oleh penduduk terhadap pelaksanaan program-program baru yang datang dari pemerintah. Program akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir elite desa/nagari yang sangat berambisi karena kepentingan ekonomi pribadi.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: Karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Konsep dan Praktik Kearifan Lokal

Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*), dan lokal (*local*). Secara umum maka *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Qodariah & Armiyati, 2013). Keberadaan kearifan lokal ini bukan tanpa fungsi. Kearifan lokal sangat banyak fungsinya. Seperti yang dituliskan Sartini (2006), bahwa fungsi kearifan lokal adalah (1) konservasi dan pelestarian sumber daya alam; (2) pengembangan sumber daya manusia; (3) pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; (4) petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan; (5) bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat; (6). Bermakna etika dan moral; (7) bermakna politik, misalnya upacara ngangkuk merana dan kekuasaan patron klien. Kearifan lokal merupakan kearifan lingkungan dalam bentuk tata nilai atau perilaku hidup dalam bermasyarakat di suatu tempat atau daerah, baik antarsesama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

2. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lainnya.

masyarakat maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka (Suhartini, 2009). Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam, ataupun gaib (Keraf, 2002).

Orang tua-tua Melayu mengungkapkan bahwa kehidupan mereka sangat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah dan juga menjadi sumber unsur-unsur budaya mereka. Dalam ungkapan-ungkapan dikatakan:

Kalau tidak ada laut

hampalah perut

Bila tak ada hutan

binasalah badan

Dalam ungkapan lain dikatakan:

Kalau binasa hutan yang lebat

Rusak lembaga hilanglah adat

Ungkapan-ungkapan di atas secara menunjukkan bersebatinya hubungan antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup dari hasil hutan atau mengolah hasil hutan. Secara turun temurun pula mereka memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat alat dan kelengkapan rumah tangga, alat pertanian, alat kelengkapan nelayan, alat berburu, alat perahu, dan sebagainya, termasuk untuk membuat obat tradisional. Namun, berdasarkan studi Thamrin (2014) nilai-nilai dan norma-norma tersebut sebagian besar telah tercabut dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sistem kelengkapan adat melayu saat ini lebih

banyak simbol dan kamuflase saja. Ini disebabkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang kapitalistik dan antroposentrik yang sudah mulai sejak zaman kolonialisme dan telah direkonstruksi oleh pemerintah dalam kehidupan orang Melayu saat ini.

Kearifan lokal juga dapat ditemukan dalam prinsip hidup orang Minangkabau dalam menyelaraskan pikiran dan perilakunya dengan alam tempat hidup dan bertempat tinggal. Falsafah hidup mereka dikenal dengan istilah *alam takambang jadi guru*. Pengertiannya adalah alam dapat menjadi guru bagi mereka, alam dengan segala gerak-geriknya bisa mengajari manusia banyak hal. Alam adalah arena pembelajaran, ia dapat menjadi inspirasi pengetahuan dan ilmu. Alam adalah pendidikan itu sendiri. Saking dekatnya mereka dengan alam, orang Minangkabau menyebut tanah kelahiran mereka dengan sebutan alam Minangkabau. Tentu saja pengertian alam disini memiliki makna yang jauh lebih luas dan ekstensif.

Kearifan lokal tersebut juga dipraktikkan dalam membangun kehidupan yang dicerminkan dalam bagaimana tanah atau lahan dimanfaatkan sesuai dengan bentuk dan karakteristik topografisnya, sebagaimana bunyi pepatahnya mereka : *"Nan rato kaparumahan, tabu tumbuah di nan lereng, kok munggu kapakuburan, nan bancah ditanami sawah"*. Dalam alam Minangkabau terdapat sejumlah tipe dari kearifan lokal ini yang berhubungan dengan tata kelola hutan, lahan dan air, seperti dengan dikenal adanya : rimbo larangan (*prohibition hutan*), banda larangan (*prohibition river*), tabek larangan (*prohibition pool/hole*), parak (*traditional agroforest for food security*), menanam pohon sebelum nikah (*tree planting before marriage*), dan goro basamo/*mutual cooperation* (Zuhud & Arismaya, 2016).



Rimbo larangan adalah kawasan hutan yang tidak boleh ditebang pohon dan semamannya, tidak masuki dan diganggu segala sumber daya alam yang ada di dalamnya, termasuk segala hewan liar.

Rimbo larangan biasanya adalah kawasan untuk konservasi dan sumber air bagi penduduk. Banda larangan terdapat di sungai sementara tabek larangan adalah sejenis kolam besar tempat dipeliharanya jenis ikan yang dilarang untuk diambil oleh siapa saja, biasanya dikuasai oleh komunitas kampung/nagari tertentu yang hasil panennya digunakan untuk kepentingan bersama terutama untuk pembangunan sarana publik. Parak adalah lahan pertanian tradisional untuk menjaga keamanan pangan komunitas/kaum, seperti : kelapa, durian, suren, duku, rotan kopi, dan berbagai jenis tanaman palawija lainnya.

Pengetahuan Hutan Berbasis Masyarakat

Ke depannya pengelolaan hutan harus berbasiskan masyarakat sekitar hutan. Paradigma kehutanan klasik sudah semesunya ditinggalkan karena tidak menjamin terciptanya kelestarian hutan dan terwujudnya keadilan sosial. Menurut Oszaer (2007) ada dua hal mendasar sebagai cara pandang yang harus dijadikan sebagai ideologi baru oleh setiap stakeholder pengelola hutan alam, yakni :

1. Pertama, bahwa hutan dan masyarakat setempat tidak dapat dipisahkan. Karena itu pengelolaan hutan harus berbasis pada masyarakat (*Community Based Forest Management*), dimana masyarakat menjadi pelaku utama. Selama ini yang terjadi adalah *state based forest management*. Kedua, bahwa hutan merupakan sebuah ekosistem yang bersifat integral. Karena itu, pengelolaan hutan konvensional yang hanya berorientasi pada kayu (*timber extraction*) harus diubah menuju pengelolaan hutan yang berorientasi pada

sumber daya alam yang bersifat multi-produk, baik hasil hutan kayu maupun non kayu, jasa lingkungan serta manfaat hutan lain (*forest resources based management*).

Perencanaan dan pengelolaan hutan dan kawasan DAS untuk masa datang dapat mempedomani pendekatan strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat yang secara internasional dikenal sebagai *community based natural resources management (CBNRM)*. Di Indonesia, CBNRM mulai berkembang pada akhir 1990-an pada akhir rezim Suharto dengan munculnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Desentralisasi Keuangan (Armitage, 2005). Strategi tersebut diperkenalkan sebagai pendekatan sosial ekonomi, politik, dan lingkungan (Pomeroy, 1995).

Child & Lyman (2005) mendefinisikan CBNRM sebagai sebuah proses dimana para landholder memperoleh akses dan menggunakan haknya atas sumber daya alam; perencanaan yang kolaboratif dan transparan dan berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam; serta memperoleh keuntungan finansial maupun keuntungan lainnya dari keterlibatan mereka. Landholder dalam pengertian ini, termasuk milik pribadi, swasta, dan komunal. Pengertian tersebut menyiratkan keharusan transfer ekonomi dan politik, sumber daya bernilai tinggi seperti hidupan liar atau kehutanan, dan perubahan dari terpusat menjadi kontrol masyarakat.

Aspek CBNRM sangat kompleks dan beragam, namun secara umum dapat disederhanakan menjadi enam aspek, yaitu (Kellert et al., dalam Emilia, 2013) :

Equity, distribusi dan alokasi sumber daya beserta keuntungan ekonomi dan sosial;

Empowerment, distribusi kekuasaan terutama di antara masyarakat lokal, termasuk menyerahkan wewenang dari



pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat dan institusi lokal, partisipasi dalam pengambilan keputusan, pembagian pengawasan, dan demokratisasi; **Conflict resolution**, penanganan dan resolusi konflik dan perselisihan atas sumber daya di antara masyarakat lokal maupun antara kepentingan lokal, daerah, dan nasional; **Knowledge and awareness**, pemilahan, pengumpulan, dan menyusun kearifan lokal maupun pengetahuan ekologi modern dalam pengelolaan sumber daya alam; **Biodiversity protection**: konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati beserta habitatnya, termasuk pengawetan dan pemulihan spesies prioritas, langka, dan terancam, maupun populasi yang terancam; **Sustainable utilization**, pemanfaatan sumber daya alam secara konservatif maupun tidak dalam upaya menjaga ketersediaannya dalam jangka waktu lama untuk generasi sekarang dan mendatang.

Perspektif Sosiologi dalam Perhutanan Sosial

Menurut Noronha & Spears (1988: 290-291), tujuan perhutanan sosial berbeda dengan rencana perhutanan biasa/komersial dalam 3 hal. Pertama, perhutanan sosial meliputi produksi dan penggunaan hasil-hasil hutan dalam satu sektor perekonomian tertentu yang tidak diedarkan sebagai uang (*non-monetized*); kedua, menyangkut partisipasi langsung pemanfaat; ketiga, mengisyaratkan bahwa kelompok pemanfaat didefinisikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, mereka secara faktual berpartisipasi sejak awal, proses dan akhir kegiatan.

Empat bidang utama penelitian sosial budaya hampir selalu diperlukan dalam merencanakan proyek-proyek kehutanan, adalah: penduduk, lahan, tenaga kerja, dan

organisasi sosial. Tiga aspek kependudukan yang perlu diuji meliputi :pola pemukiman, tingkat pertumbuhan penduduk, dan homogenitas penduduk. Hasil jawaban dari pertanyaan ini akan mempengaruhi rancangan penyuluhan, lokasi kebun bibit dan personalia yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Perkiraan tambahan penduduk juga penting untuk mengukur permintaan lahan di masa akan datang untuk tanaman pangan, kebutuhan kayu bakar dan pakan ternak, dan kendala-kendala bagi terlaksananya proyek. Heterogenitas penduduk yang menjadi ciri negara berkembang, ada pembagian menurut pertalian etnik dan kelas sosial.

Elemen penting perhutanan sosial adalah masalah lahan, yakni mempelajari cara-cara lahan digunakan, dikuasai, dialihkan dan diwariskan. Hal ini penting karena menandakan status dan karakteristik kelompok serta tingkat teknologinya. Sering timbul konflik antara hak milik atas lahan menurut undang-undang dan pola-pola pembangunan lahan secara tradisional.

Ada sejumlah pernyataan yang mesti dijawab soal tenaga kerja, bagaimana pembagian tradisional tenaga kerja, siap yang akan memberikan tenaganya apakah tenaga kerja harus sukarela atau dibayar. Tentang organisasi sosial, perlu dipahami bagaimana cara-cara suatu masyarakat diorganisasi, hubungan antar kelompok yang berbeda dan lembaga-lembaga, pola-pola hierarki, kepemimpinan, cara ide, pesan-pesan, inovasi diperkenalkan dan dikomunikasikan di tengah masyarakat.

5. REFERENSI

- [1] Purba, Christian PP. et.al., 2014, Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013, Bogor : Forest Watch Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

[1] <http://www.tempo.co/read/news/2014/07/01/095589444/Kerusakan-Hutan-Indonesia-Terus-Meningkat>.

[2] Setiap Tahun, Hutan Indonesia Hilang 64.000 Hektar. <http://www.kompas.com> [diakses tanggal 15/11/2017].

[3] UNDP, 2013, Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ di Indonesia.

[4] Oszaer, R., 2007, *Pembangunan Hutan Berbasis Ekosistem dan Masyarakat. Paper Pelatihan Penanaman Hutan Di Maluku & Maluku Utara*, tanggal 12-13/12/2007.

[5] Ngroho, Bramantyo Tri Adi. et.al., 2008, Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Ekosistem Hutan Alami Bedugul-Pancasari, Bali. *Jurnal Biodiversitas*, Vol 9 Nomor 3/7/2008 Hal 227-231.

[6] Salminah, Mimi, et.al., 2014, Karakteristik Ekologi dan Sosial Ekonomi Lanskap Hutan pada DAS Kritis dan Tidak Kritis: Studi Kasus di DAS Baturusa dan DAS Cidanau. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 11 No. 2 Juni 2014, Hal. 119-136.

[7] Oodariah & Armiyati., 2013, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Naga Sebagai Alternatif Sumber Belajar IPS SMP di Tasikmalaya, *Jurnal Socia* , Vol. 12, No. 1 Mei 2013.

[8] Siharitini, 2009, Kajian Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional*

Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.

- [10] Keraf, A.S., 2002, *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- [11] Thamrin, Husni. *Marjinalisasi Tanah Adat Dan Kearifan Lingkungan Orang Melayu*. Paper UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- [12] Zuhud & Arismaya, 2016, *Nature Philosophy of Minangkabau. Paper Workshop Traditional Knowledge for Ecosystem Services in ASEAN Countries Folk Culture: Proverbs, Old Sayings and Community Rules*. Kuala Lumpur, 2–4 March 2016.
- [13] Sartini, 2006, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah kajian Filsafati. <http://filsafat.ugm.ac.id>, diakses tanggal 05 Juli 2012.
- [14] Child, Brian & Martha West Lyman. 2005, 'Introduction', in Brian Child and Martha West Lyman (ed), *Natural Resources as Community Assets*, Sand County Foundation, Wisconsin.
- [15] Emilia, Fransisca, 2013, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus Desa Keseneng, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang)* Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
- [16] Noronha, Raymond & John S Spears., 1988, Variabel-variabel Sosiologi dalam Rancangan Proyek Kehutanan. *Dalam Michael M. Cernea (Ed.). 1988, Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta : UI Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

